### KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2019

**Program : Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

**Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah**

1. **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, disusunlah Kerangka Acuan Kerja yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### DASAR HUKUM

* 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah.
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
	7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah /
	8. Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 3 (empat) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian.

Tugas Pokok Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama memiliki menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Kerjasama.

Bagian Otonomi daerah dibantu 3 Sub bagian yaitu : Urusan Pememerintahan dan Standar Pelayanan Minimal, Sub bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) dan Peningkatan Kapasitas Daerah, dan Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas :

* 1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang Evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah
	2. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD Provinsi dan akhir masa jabatan Gubernur
	3. Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	4. Menyiapkan bahan pengolahan database LPPD skala Daerah
	5. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah
	6. Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas daerah
	7. Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah daerah.
	8. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota
	9. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan datya saing, dan
	10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada tahun 2019 pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah melaksanakan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Kapasitas Daerah yang terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :

* Penyusunan LPPD/ILPPD
* Peringatan Hari Otonomi Daerah
* Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
* Pesta Rakyat Jawa Tengah
* Penyusunan Evaluasi Pemetaan Kapasitas Daerah

Dengan total anggaran Rp. 3.490.000.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.422.600.000 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.067.400.000.

### MAKSUD DAN TUJUAN.

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah, Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan Keputusan.

# ANGGARAN

Terlampir

# PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Program Dan Kegiatan pada Subbagian EKPD dan Kapasitas Daerah, Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002